



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR *41* TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2022.

- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 OKTOBER 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 41 TAHUN 2021  
TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PRIORITAS TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2022

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyiaran, maka diperlukan regulasi terkait Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Dalam rangka penguatan produk lokal maka diperlukan Tata Kelola dan Pemasaran Eksport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah secara kongkrit.
3. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permasalahan yang muncul terkait kualitas air dan kekeringan di Jawa Tengah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
5. Lahirnya Undang-Undnag 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan, sehingga dibutuhkan regulasi terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
6. Undang-Undnag 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sangat mempengaruhi sektor penanaman modal, sehingga dibutuhkan perbaikan terhadap regulasi terkait Penanaman Modal Di Jawa Tengah.
7. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, maka diperlukan sebuah regulasi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah.
8. Undang-undnag 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menempatkan bahwa Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai urusan wajib, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di provinsi Jawa Tengah.

### C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2022

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2022, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.



**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2022**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Penyiaran	DPRD
2.	Tata Kelola dan Pemasaran Eksport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah	DPRD
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	DPRD
4.	Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
5.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD
6.	Penanaman Modal Di Jawa Tengah	DPRD
7.	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR
8.	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	GUBERNUR

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
3.	APBD Tahun Anggaran 2023

**D. PENUTUP**

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah,

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KE T
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda	Penyelenggaraan Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan terhadap pengawasan program siaran lokal dan berita.</li> <li>- Penguatan kelembagaan penyiaran yang ada di Jawa Tengah.</li> <li>- Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk sadar media</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informasi.</li> <li>- Biro hukum</li> <li>- BAPPEDA</li> </ul>	2022	
2.	Perda	Tata Kelola dan Pemasaran Exsport Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ekonomi masyarakat di</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang 23 tahun 2014</li> </ul>	V		1. Dinas Pertanian Dan	2022	



NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>daerah</li> <li>- Penguatan dan perlindungan produk lokal pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.</li> <li>- Penguatan pemasaran produk lokal pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.</li> <li>- Pemberdayaan pelaku usaha sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>- Undang-undang 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkebunan</li> <li>2. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan,</li> <li>3. Dinas Kelautan Dan Perikanan,</li> <li>4. Dinas Koperasi Dan UMKM,</li> <li>5. Dinas Perdagangan Dan Industri, DPMPTSP</li> </ul>		
3.	Perda	Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>- Proses</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>- Peraturan</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKAD</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- BAPENDA</li> </ul>	2022	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD dan KUA PPAS - Proses pelaksanaan dan penataan usaha keuangan daerah. - Proses pelaporan akuntansi keuangan daerah. - Pertanggungjawaban Anggaran Daerah. - Penyelesaian utang daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. - Proses penyelesaian kerugian			Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Permendagri 77 tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah.					



NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keuangan daerah								
4	Perda	Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perkembangan zaman.</li> <li>- Tantangan dan kondisi terkini dalam pengendalian pencemaran air Lintas Kabupaten/</li> </ul>		V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja</li> <li>3. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ol>		V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas LHK</li> <li>2. Dinas PU SDA TARU</li> <li>3. Biro Hukum</li> <li>4. BAPPEDA</li> <li>5. PD terkait lainnya</li> </ol>	2022	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kota di Provinsi Jawa Tengah juga semakin kompleks.								
5	Perda	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Ketenagakerjaan</li> <li>- Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</li> <li>- Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja</li> <li>- Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</li> <li>- Pengupahan</li> <li>- Perlindungan Tenaga Kerja</li> <li>- Pembinaan Pengawasan</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Peran Serta Masyarakat</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 18</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</li> <li>2. Biro Hukum</li> <li>3. BAPPEDA</li> </ul>	2022	



NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja					
6.	Perda	Penanaman Modal Di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan Penanaman Modal</li> <li>- Kebijakan Penanaman Modal.</li> <li>- Peran Serta Masyarakat.</li> <li>- Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li> </ul>		V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>- Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>- PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi Di</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMPTSP</li> <li>- Biro Hukum</li> <li>- Bappeda</li> </ul>	2022	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah					
7.	Perda	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah	Pembinaan dan Pengembangan Pesantren	V		- Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren. - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren	V		- Biro Kesra - Biro Hukum	022	
8.	Perda	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan LINMAS		V	Permendagri NO. 26 Tahun 2020	V		- Satpol PP - Biro Hukum	022	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

